

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH di tahap proses penyidikan dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di tahap proses penyidikan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori-teori dengan sumber data secara sekunder yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti literature buku, jurnal, situs atau sumber lain sebagai tambahan penulis melakukan wawancara dengan penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah yaitu korban menolak untuk melakukan konseling atau melakukan pengecekan psikiater dan kurang terbukanya korban pada saat dimintai keterangan dikarenakan korban merasa malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya sehingga tidak memberikan keterangan yang jelas dan jujur.

Kata kunci : *Perlindungan Anak, Korban, Pencabulan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the application of legal protection to victims of child abuse in the Police Report Number LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/CENTRAL JAVA POLDA at the stage of the investigation process and to find out what are the obstacles in legal protection for children as victims of obscenity at the stage of the investigation process. This research method uses a normative juridical method which is carried out based on the main legal material by examining theories with secondary data sources obtained indirectly or through intermediary media such as literature books, journals, websites or other sources in addition to the authors conducting interviews with investigators. Unit PPA Sat Reskrim Banyumas Police.

The results of the research and discussion can be concluded that the application of legal protection to victims of child abuse in the Police Report Number LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Central Java is in accordance with Article 82 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Obstacles in the application of legal protection to children who are victims of criminal acts of sexual abuse of minors in the Police Report Number LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Central Java, namely the victim refuses to do counseling or checks with a psychiatrist and the victim is less open at the time of questioning because the victim was embarrassed or afraid to tell the incident that happened to him so that he did not provide clear and honest information..

Keywords: Child Protection, Victims, Obscenity